

LAPORAN TERHANGAT

Gas Melon Langka, Harga Melonjak

Gas elpiji 3 kg bersubsidi, atau akrab disebut gas melon dilaporkan mengalami kenaikan harga dan kelangkaan stok di pasaran. Laporan berasal Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Tegal, Klaten, Pamekasan (Jawa) dan Medan, Binjai, Indragiri Hulu (Sumatera). Dari seluruh laporan tersebut tercatat kenaikan harga berkisar Rp 2.000 s.d. Rp 3.000 dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat menilai hal ini terjadi karena kelangkaan gas di tingkat distributor dan agen. Namun, PT Pertamina menjawab bahwa tidak ada pengurangan stok dalam distribusi ke daerah.

Untuk mengatasi hal ini, PT Pertamina perlu segera menganalisis distribusi gas, misalnya: 1) apakah jumlah gas yang didistribusikan sudah sesuai dengan permintaan; 2) apakah distribusi sampai tepat waktu dan tepat sasaran; 3) bagaimana pengawasan distribusi di lapangan. (<https://lapor.ukp.go.id/id/1315955>, <https://lapor.ukp.go.id/id/1316669>)

TKI Korban Penipuan Terlunta-lunta di Gabon

Enam TKI ditipu oleh sebuah perusahaan di Gabon. Masalah berawal dari penawaran kerja sebagai operator alat berat dari sebuah perusahaan. Nyatanya, gaji yang diterima tidak seperti yang dijanjikan dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya tidak dipenuhi. Bahkan para pekerja kemudian diusir dan kini terlunta-lunta di Gabon, hidup menumpang dan sebagian dalam kondisi sakit. Mereka ingin pulang namun tidak ada biaya.

Pada 16 Februari 2015, pihak keluarga TKI telah melaporkan hal ini ke KBRI Senegal-Gabon, Kemenlu, Kemenaker, dan BNP2TKI. Pemerintah perlu segera melakukan pengecekan kondisi dan memberikan advokasi bantuan hukum/finansial kepada para TKI ini. (<https://lapor.ukp.go.id/id/1321379>)

Pengolahan Limbah Buruk, Masyarakat Jadi Korban

Tercatat sejumlah laporan terkait limbah yang dipermasalahkan kelompok warga, terutama mengenai buruknya sistem pengolahan limbah milik pabrik dan industri rumah tangga sehingga masyarakat sekitar menjadi korban. Dampaknya beragam, mulai dari pencemaran udara dan saluran air (seperti di Tangerang, Bandung, dan Jakarta) hingga tercemarnya sungai yang merupakan sumber penghidupan warga (di wilayah Kalbar).

Aturan mengenai pengolahan limbah sebenarnya sudah jelas termaktub di dalam UU. Namun, permasalahan utama terletak pada sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat perlu melakukan supervisi ketat terhadap kinerja BPLHD serta mengambil inisiatif dan tindakan tegas apabila memang diperlukan, terutama mengenai AMDAL dari setiap pabrik/industri. (<https://lapor.ukp.go.id/id/1314598>, <https://lapor.ukp.go.id/id/1314282>, <https://lapor.ukp.go.id/id/1315208>, <https://lapor.ukp.go.id/id/1320460>)

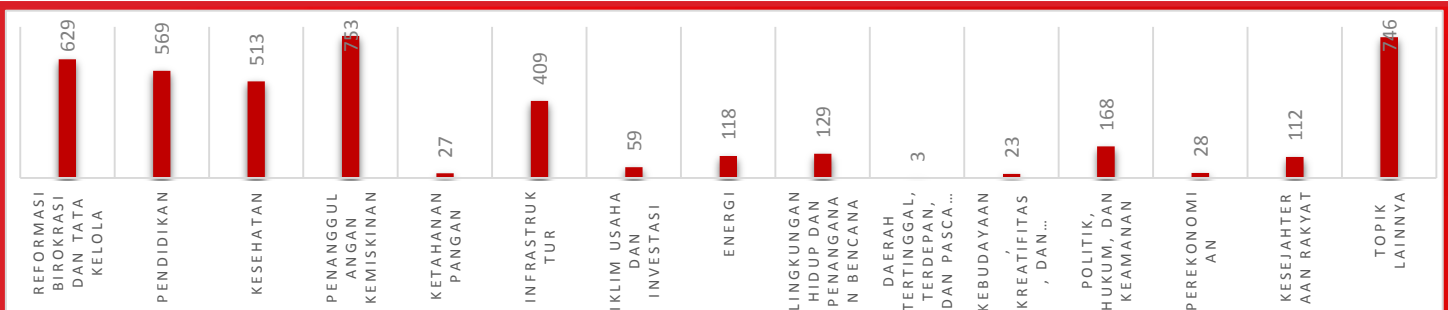
Masalah Tes CPNS 2014

Berbagai masalah mewarnai seleksi CPNS 2014, antara lain:

- Pengumuman akhir belum keluar ([#1315780](#) [#1316355](#)), bahkan hasil TKD masih ada yang belum diumumkan ([#1314410](#) [#1315738](#)). Hal ini melanggar aturan KemenPAN-RB No. B/498/M.PAN.RB/01/2015.
- Permenpan 17/2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014 tidak tersosialisasikan kepada para peserta. ([#1315272](#))
- Ada peserta yang lolos padahal nilainya tidak memenuhi minimum nilai TKD ([#1314925](#)) dan tidak ikut TKB ([#1315461](#))
- Pengumuman hasil dinilai kurang transparan. ([#1317744](#), [#1319524](#))

Untuk tes CPNS berikutnya, KemenPAN-RB dapat meningkatkan standar proses dan pengetatan aturan guna meminimalisasi berulangnya masalah tersebut, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas seleksi.

KATEGORI LAPORAN



1. Petani di Aceh Singkil tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi.
2. Maraknya aksi begal di Sumut (Belawan, Medan, Binjai, Deli Serdang) dan Lampung (Way Kanan, Lampung Selatan).
3. Masalah listrik di Riau (Indragiri Hulu dan Kuantan Singigi), Sumsel (Musi Rawas Utara), dan Lampung (Tanggamus dan Tulang Bawang).

1. Penjualan barang bekas impor di Sambas Kalbar meningkat.
2. Izin kapal perintis pengangkut makanan dicabut, Pulau Sembilan Kalsel terancam krisis pangan.
3. Hutan Taman Rakyat (HTR) di Kotawaringin Kalteng diklaim oleh pihak swasta.
4. Banyak ruas jalan nasional di Kaltim rusak.

1. Jalan Manado-Tomohon Sulut rawan longsor.
2. Pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa di Sulteng terhenti.
3. Jalan poros Mamasa-Polman-Mamuju-Tana Toraja (Sulsel-Sulbar) dan Malino-Maros-Makassar (Sulsel) rusak parah.

1. Ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian perkara di Kejaksaan Tinggi Maluku.
2. PNS di Pemkab Seram Bagian Barat, Maluku tidak memperoleh uang makan sesuai dengan Permenkeu No.53/PMK.02/2014.



Keterangan Peta:

- 1 - 51 Laporan
- 51 - 500 Laporan
- > 500 Laporan

1. Masyarakat berharap Stasiun Gandrumangun Jateng diaktifkan kembali.
2. Limbah dari pabrik kimia di Cibodas, Tangerang, Banten menimbulkan bau asam menyengat.
3. Adanya megaproyek anak perusahaan Thailand di Sukabumi Jabar tanpa persetujuan warga.
4. Normalisasi saluran air di wilayah Jakarta kurang maksimal.

1. Pulau di Nusa Penida berusaha dikuasai oleh perseorangan, Bupati Klungkung belum bertindak.
2. Laporan kinerja pegawai imigrasi Bandara Ngurah Rai - Bali.

1. Kantor Desa Lenangguar, NTB disegel warga sejak 3 bulan lalu karena lambatnya penetapan penggunaan ADD.
2. Pupuk bersubsidi langka di Lembor NTT.
3. Kurangnya fasilitas untuk proses belajar-mengajar di Kupang NTT.

1. Pemekaran daerah otonom baru (DOB) berdasarkan UU 23 / 2014 belum direalisasikan.
2. Rusaknya travo PLN membuat sebagian wilayah Kota Jayapura tidak teraliri listrik selama berminggu-minggu.

PENGLOLAAN LAPORAN MASYARAKAT

Tindak Lanjut Instansi

Pengelolaan Laporan oleh K/L di LAPOR!

Kepasifan beberapa instansi dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui LAPOR! masih berlangsung, antara lain terjadi di Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian ATR/BPN.

Walaupun begitu, beberapa instansi masih stabil dan konsisten dalam menunjukkan performa terbaiknya dalam menindaklanjuti laporan, diantaranya adalah BPJS Kesehatan, Bank Indonesia, dan Kemen-PANRB.

Masyarakat juga dapat ikut serta memantau tindak lanjut laporan dengan memanfaatkan fitur interaktif di LAPOR! untuk mendorong tindak lanjut dan penuntasan setiap laporan.

Perkembangan Terkini

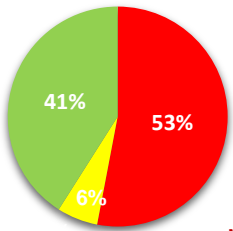
Kunjungan Studi Mahasiswa MMTC Yogyakarta ke LAPOR!

Pada 25 Februari 2015, Pengelola LAPOR! menerima kunjungan studi dari Sekolah Tinggi Multimedia "MMTC" Yogyakarta (UPT Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk mempelajari proses pengelolaan informasi dan dokumentasi data di LAPOR!. Sesi ini dihadiri oleh 2 orang dosen pembimbing dan seluruh mahasiswa prodi Manajemen Informasi dan Komunikasi.

Pada kesempatan ini Bpk. Agung Hardjono (Kantor Staf Presiden) menyampaikan apresiasinya dan meminta agar para mahasiswa ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan serta membantu sosialisasi LAPOR! ke masyarakat. Harapannya, pertemuan ini dapat memperluas komunitas pengguna LAPOR! terutama di Yogyakarta sehingga data aspirasi dan pengaduan yang masuk semakin kaya untuk kemudian menjadi bahan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

STATISTIK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA SAMPAI BULAN FEBRUARI 2015

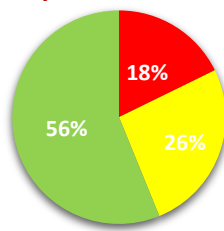
Status Laporan Kementerian/Lembaga



n = 52171

■ Belum ■ Proses ■ Selesai

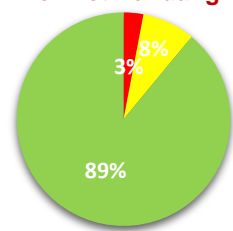
Status Laporan Pemprov DKI Jakarta



n = 19839

■ Belum ■ Proses ■ Selesai

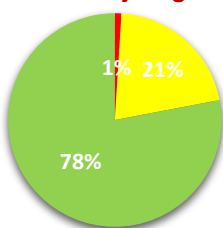
Status Laporan Pemkot Bandung



n = 6211

■ Belum ■ Proses ■ Selesai

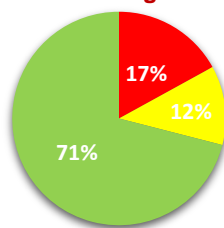
Status Laporan Pemkab Bojonegoro



n = 411

■ Belum ■ Proses ■ Selesai

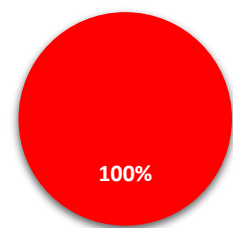
Status Laporan Pemkab Indragiri Hulu



n = 119

■ Belum ■ Proses ■ Selesai

Status Laporan Pemkab Gorontalo



n = 22

■ Belum ■ Proses ■ Selesai

Jumlah Laporan Diteruskan

Pada Februari 2015, terdapat **2736 laporan** yang telah diteruskan ke instansi pemerintah pusat/daerah untuk ditindaklanjuti (676 laporan berstatus selesai dan 2060 laporan masih dalam proses).

Isi Laporan Diteruskan

Laporan masyarakat berisi permintaan informasi, aspirasi, dan pengaduan terkait pembangunan dan pelayanan publik. Isu yang mengemuka pada bulan ini adalah:

- 22,40% (613 laporan) berkaitan dengan program bantuan sosial KKS dan beras untuk rakyat miskin (raskin).
- 15,53% (425 laporan) berkaitan dengan program pendidikan, seperti dana sertifikasi guru, Dapodik dll.
- 13,38% (366 laporan) berkaitan dengan program kesehatan, seperti masalah pendaftaran BPJS Kesehatan, dll.



Ringkasan Laporan FEBRUARI 2015

Pertanyaan tentang ringkasan laporan serta saran dalam penyajiannya dapat dikirimkan ke:

muhhammad.gibran@ukp.go.id